

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Achmad Ali, 2007, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kendana, Jakarta, Volume

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ali Parman, 1995, *Kewarisan Dalam Al-Quran*, Cetakan Pertama, Jakarta : Rajawali Pers.

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta (Buku Wajib Kenotariatan)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Darus, M. Luthan Hadi, 2017, *Hukum Notariat dan tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta, UII Press,

Eugenius Sumaryono, 2008, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, Kanisius, Yogyakarta.

Habib Adjie (I), 2007, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris*, Refika Aditama, Surabaya.



_____, 2008, *Sanksi Perdata dan Administif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT.Refika Aditama, Bandung.

_____, 2009, *Hukum Notaris Di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung.

Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of Law & State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, Alih Bahasa oleh Somardi.

Herlien Budiono, 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Indroharto, 1993, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. I, Pustaka Harapan, Jakarta.

Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta.

Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Bayumedia Publishing, Malang.

Notodisoerjo, Soegondo. 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

_____, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta,

Philiphus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: GadjahMada University Press.

Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung.



Ridwan HR,2010, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

R.Subekti 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasa, Jakarta.

Salim, HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Peranggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Surabaya.

Supriadi, 2008, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tan Thong Kie, *Studi Kenotariatan Serba-serbi Praktek Notaris*, PT. IchtiarBuku Van Hoeve, Jakarta.

Winarno Surakhmad, 1972, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode & Teknik*, Tarsito, Bandung.

B. Makalah-Makalah

Abdul Bari Azed, SH.,MH.,Prof “ *Kebijakan Penguatan Fungsi Kelembagaan Majelis Pengawas Notaris*” (makalah disampaikan pada Kongres INI ke-XX, Surabaya, 28 Januari 2009).

Philipus M. Hadjon,1997, *Tentang Wewenang*, *Makalah Bulanan Yuridika* no.5-6 Tahun XII September – Desember, Universitas Airlangga, Surabaya.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitan Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.13-HT.03.10 Tahun 1993 tanggal 24 Februari 1993 tentang Pembinaan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.03.HT.03.10.Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris,

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.HH-06.AH.02.10. Tahun 2009 tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris.



Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, nomor 25 tahun 2014 Tentang Tata cara Pengangkatan, perpindahan, pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

D. Jurnal Ilmiah

Ida Ayu Md Dwi Sukma Cahyani, *Kepastian Hukum Penyerahan Protokol Notaris Kepada Penerima Protokol Notaris*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2016-2017.

Jurnal Ilmiah Brinda Anitha Wirastutidan J. Andi Hartanto “Akibat Hukum Protokol Notsris yang tidak diserahkan oleh Ahli waris kepada Notaris lain, Al-Qanun, Vol.20, No.2, Desember 2017.

Putu Mas Maya Ramanti, *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Minuta Yang di Buat Berdasarkan Keterangan Palsu*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan 2011-2016.

E. Bahan Ajar

Yuslim, *Bahan Ajar Magister Kenotariatan Unand*, Lokal Mandiri-B, 27 Agustus 2016.

F. Internet

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51665a7f58572/prosedur-penyerahan-protokol-notaris-yang-meninggal-dunia>, hari selasa tanggal 07 Agustus 2018, jam 15.30WIB.

<http://www.m.hukumonline.com/klinik/detail/golongan-ahli-waris-menurut-KUHPerdata>, hari jumat tanggal 26 Oktober 2018, jam 14.00WIB.

